



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Pertimbangan Faktor Internal dan Eksternal**  
**Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Kontra**  
**Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di**  
**Asia Tenggara**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Gisela Bernadi

2016330041

Bandung

2019



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**

*Terakreditasi A*

*SK BAN -PT NO: 3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019*

**Pertimbangan Faktor Internal dan Eksternal**  
**Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Kontra**  
**Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di**  
**Asia Tenggara**

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Gisela Bernadi

2016330041

Bandung

2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



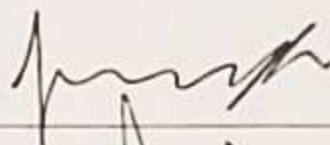
**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Gisela Bernadi  
Nomor Pokok : 2016330041  
Judul : Pertimbangan Faktor Internal dan Eksternal Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Kontra Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di Asia Tenggara

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 8 Januari 2020  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**  
Adrianus Harsawaskita, S. IP., M.A.

: 

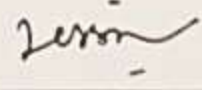
**Sekretaris**

Dr. I Nyoman Sudira

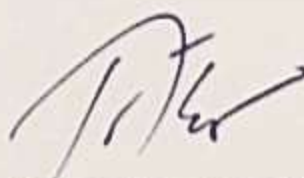
: 

**Anggota**

Jessica Martha, S. IP., M.I.Pol.

: 

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Gisela Bernadi  
NPM : 2016330041  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Judul : Pertimbangan Faktor Internal dan Eksternal Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Kontra Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di Asia Tenggara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 9 Januari 2020

Penulis,



Gisela Bernadi

## ABSTRAK

**Nama** : Gisela Bernadi  
**NPM** : 2016330041  
**Judul** : **Pertimbangan Faktor Internal dan Eksternal Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Bidang Kontra Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di Asia Tenggara**

---

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang menjadi pertimbangan dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya kontra terorisme di kawasan Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan mengacu pada pertanyaan penelitian: **apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo terkait isu kontra terorisme di Asia Tenggara?** Penggunaan paradigma neorealisme, teori *defensive realism*, *role theory and foreign policy* serta *model on counter terrorism* sebagai landasan teori, penelitian ini akan memaparkan faktor internal dan eksternal yang menjadi pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang kontra terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta teknik pengumpulan data analisis dokumen. Peningkatan dalam penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme menjadi penyebab dari urgensi pemerintah negara ASEAN untuk segera melakukan upaya penangkalan terhadap paham radikalisme dan aksi terorisme. Di tingkat internal, kelompok kepentingan, gerakan massa dan partai politik; opini publik; serta politik pembuat kebijakan dalam bidang kontra terorisme memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Komitmen negara-negara di Asia Tenggara terhadap upaya kontra terorisme dan perjanjian bilateral serta multilateral kontra terorisme menjadi faktor eksternal di tingkat regional.

**Kata Kunci** : ASEAN, Regional, Indonesia, Joko Widodo, radikalisme, terorisme.

## ABSTRACT

**Name** : *Gisela Bernadi*  
**Std. Number** : *2016330041*  
**Title** : *The Consideration of Internal and External Factors of Indonesia Foreign Policy in the Counter-Terrorism Sector during Joko Widodo Administration in Southeast Asia*

---

*The purpose of this study is to explain the internal and external factors which considerate by Indonesia's foreign policy-maker in counter-terrorist area in the Southeast Asia under Joko Widodo administration by referring to the research question: **what are the internal and external in Indonesia's foreign policy during the Joko Widodo administration related to counter-terrorism issues in Southeast Asia?** By using the neo-realism, defensive realism theory, role theory, and foreign policy, as well as models on counter-terrorism, this study will explain internal and external factors as the consideration for Indonesia's foreign policy in the counter-terrorism sector during the Joko Widodo administration in Southeast Asia uses the qualitative research methods and document analysis techniques. The rising of radicalism concept and acts of terrorism has urged the governments of ASEAN countries to counter the spread of the concepts and acts regionally. At the internal level, interest groups, mass movements, and political parties; public opinion; and politics of Indonesia policy-maker in the counter-terrorism sector affect Indonesia's foreign policy. Commitments of Southeast Asia countries against counter-terrorism efforts together with bilateral and multilateral counter-terrorism agreements are the external factors that affect Indonesia's foreign policy at the regional level.*

**Keywords** : *ASEAN, region, Indonesia, Joko Widodo, radicalism, terrorism.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Dilatarbelakangi peningkatan dalam penyebaran paham radikalisme dan aksi terorisme, penelitian ini akan mengkaji faktor internal dan eksternal yang dijadikan pertimbangan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo di Asia Tenggara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan prespektif tambahan mengenai kajian kerja sama keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta dalam kajian keamanan dan politik internasional. Tidak lupa, penulis juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang memberikan dukungan dalam menyelesaikan penelitian ini: keluarga dan teman-teman di HI Unpar 2016. Banyak terima kasih juga penulis sampaikan kepada Mas I Nyoman Sudira selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan baik dari segi teknis maupun substantif. Oleh sebab itu, penulis akan sangat berterimakasih atas adanya kritik dan saran yang membangun sebagai masukan untuk melengkapi penelitian ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Bandung, 11 Desember 2019

Gisela Bernadi

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I: Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.1 Pembatasan Masalah .....	7
1.2.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Kajian Literatur .....	9
1.5 Kerangka Pemikiran .....	11
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.6.1 Metode Penelitian .....	16
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data .....	18
1.7 Sistematika Penelitian .....	18
1.8 Kerangka Kerja .....	19
<b>BAB II: Terorisme di Indonesia dan Perkembangan Kerangka Kerja Sama Kontra Terorisme di Asia Tenggara</b> .....	<b>20</b>
2.1 Tri-Border Area di Asia Tenggara .....	21
2.2 Opini Publik, Kelompok Kepentingan dan Politik Pembuat Kebijakan dalam Bidang Kontra Terorisme sebagai Faktor Internal dari Kebijakan Luar Negeri Indonesia .....	25
2.2.1 Kelompok Kepentingan, Gerakan Massa dan Partai Politik .....	28
2.2.2 Opini Publik .....	30
2.2.3 Politik Pembuat Kebijakan dalam Bidang Kontra Terorisme .....	36
2.3 Perjanjian Multilateral, Bilateral dan Komitmen Negara di Asia Tenggara sebagai Faktor Eksternal dari Kebijakan Luar Negeri Indonesia .....	39



2.3.1.	Perjanjian Multilateral dan Bilateral dalam Kawasan Asia Tenggara ..	40
2.3.2.	Komitmen Negara-Negara di Asia Tenggara terhadap Upaya Kontra Terorisme .....	46

**BAB III: Faktor Internal dan Eksternal sebagai Pertimbangan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Bidang Kontra-Terrorisme Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo di Asia Tenggara .....** 51

3.1.	Kebijakan Internal Pemerintah Indonesia Dalam Bidang Kontra Terorisme pada Masa Pemerintahan Joko Widodo.....	52
3.1.1.	Pendekatan Pemerintah dalam Upaya Kontra Terorisme di Tingkat Internal.....	56
3.1.2.	Tahapan Kontra Terorisme Internal, Opini Publik dan Kelompok Kepentingan dalam Membentuk Sifat Kebijakan Kontra Terorisme Joko Widodo.....	61
3.2.	Kerangka Kerja sama dalam Bidang Kontra Terorisme di Asia Tenggara...	70
3.2.1.	Karakteristik Kerja sama Keamanan di Kawasan Asia Tenggara.....	71
3.2.2.	Perjanjian Bilateral dan Multilateral dalam Bidang Kontra Terorisme di Kawasan Asia Tenggara.....	76

<b>BAB IV: Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR SINGKATAN

1. AMIN: Angkatan Mujahidin Islam Nusantara
2. ASG: *Abu Sayyaf Group*
3. BIN: Badan Intelijen Negara
4. BNPT: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
5. CSIS: *Centre for Strategic and International Studies*
6. Densus 88: Detasemen Khusus 88
7. DI/TII: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
8. DKPT: Desk Koordinasi Penanganan Terorisme
9. FBI: *Foreign Bureau Intelligence*
10. FPI: Front Pembela Islam
11. FTF: *Foreign Terrorist Fighter*
12. GMF: *Global Maritime Fulcrum*
13. HTI: Hizbut Tahrir Indonesia
14. IS: *Islamic State*
15. ISIS: *Islamic State of Iraq and Syria*
16. JI: Jemaah Islamiyah
17. JS: *Jemaah Salafiyah*
18. KM: Komite Aksi Penanggulangan Akibat Krisis Mujahidin
19. KMM: *Kumpulan Mujahidin Malaysia*
20. LJ: Laskar Jihad
21. MCC: *Maritime Command Centers*
22. NII: Negara Islam Indonesia
23. NU: Nahdlatul Ulama
24. Polri: Polisi Republik Indonesia
25. TCA: *Trilateral Cooperative Arrangement*
26. TMP: *Trilateral Maritime Patrol*
27. TNI: Tentara Nasional Indonesia
28. ESSCOM: *Malaysia Eastern Sabah Security Command*
29. Koopsus: Komando Operasi Khusus
30. Perppu: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
31. AMMTC: *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*
32. ASC: *ASEAN Security Community*
33. APSC: *ASEAN Political-Security Community*
34. Sat-81: Detasemen Khusus 81 Kopassus
35. Satbravo-90: Satuan Bravo 90
36. Koopsusgab: Komando Operasi Khusus Gabungan
37. MIT: Mujahidin Indonesia Timur
38. YLP: Yayasan Lingkaran Perdamaian
39. WNI: Warga Negara Indonesia
40. ACDFIM: *ASEAN Chiefs of Defense Forces' Informal Meeting*
41. AMIIM: *ASEAN Military Intelligence Informal Meeting*
42. AMOIM: *ASEAN Military Operations Informal Meeting*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemunculan kelompok terorisme di Asia Tenggara tidak lagi terbatas pada kelompok separatis di suatu negara, namun munculnya kelompok-kelompok terorisme yang berafiliasi dengan *Al-Qaeda*, dimana pendirian kelompok tersebut merupakan hasil penyebaran ideologi kelompok terorisme tersebut atau pengiriman anggota langsung dari Afghanistan<sup>1</sup>. Di Asia Tenggara, *Al-Qaeda* menyebarkan ideologi, memberikan bantuan finansial dan operasional bagi kelompok-kelompok islam radikal di Asia Tenggara yang berada di Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Myanmar<sup>2</sup>, dimana kelompok terorisme terbesar di Asia Tenggara berada di Indonesia, Thailand dan Filipina<sup>3</sup>. Sejarah kelompok terorisme di Indonesia telah dimulai sejak kemunculan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di

---

<sup>1</sup> Natasha Hamilton-Hart, "Terrorism in Southeast Asia: Expert Analysis, Myopia and Fantasy", *The Pacific Review* (2014): 303 – 325.

<sup>2</sup> Rohan Gunaratna, "Terrorism in Southeast Asia: Threat and Response", *Islamism in Southeast Asia* (2007): 1-12.

<sup>3</sup> Aurel Croissant dan Daniel Barlow, "Following the Money Trail: Terrorist Financing and Government Responses in Southeast Asia", *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 30 (2007): 131 – 156.

bawah pimpinan Kartosuwirjo pada tahun 1953<sup>4</sup>. Namun, titik puncak pendirian kelompok terorisme di Indonesia dan Asia Tenggara adalah ketika berdirinya *Jemaah Islamiyah* (JI) pada tahun 2001<sup>5</sup>, dimana JI merupakan kelompok terorisme utama di Asia Tenggara yang berafiliasi dengan jaringan terorisme Al-Qaeda<sup>6</sup>. Selain di Indonesia, kelompok terorisme dengan afiliasi *Al-Qaeda* juga berada di Filipina, yakni *Abu Sayyaf Group* (ASG) yang merupakan hasil dari kerja sama *Al-Qaeda* dengan kelompok islam radikal lokal di Filipina pada tahun 1990<sup>7</sup>. Perluasan pengaruh jaringan terorisme *Al-Qaeda* tidak hanya berhenti sampai di Filipina dan Indonesia, namun *Al-Qaeda* juga ikut mengambil bagian dalam pendirian *Kumpulan Mujahidin Malaysia* (KMM) di Malaysia dan *Jemaah Salafiyah* (JS) di Thailand<sup>8</sup>. Pada tahun 2011, terdapat perubahan arah dari kelompok terorisme di Asia Tenggara menuju ke jaringan terorisme *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) akibat adanya perpecahan kelompok terorisme di Suriah yang ditandai dengan pendirian Katibah Nusantara untuk menyatukan anggota kelompok terorisme di Malaysia dan Indonesia atau kelompok terorisme berbahasa melayu<sup>9</sup>.

---

<sup>4</sup> C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia* (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-en Volkenkunde, Leiden University, 1981), hal. 30.

<sup>5</sup> Greta Nabbs-Keller, "Strategic Clarity, Political Uncertainty: Prospects for Defence and Security under President Joko Widodo", *New Perspectives on Indonesia: Understanding Australia's Closest Asian Neighbour* (2014): 2–23.

<sup>6</sup> Loc. Cit, Hamilton-Hart.

<sup>7</sup> Ben Dolven, dkk., "Terrorism in Southeast Asia", *Congressional Research Service*: 1-40.

<sup>8</sup> Loc. Cit, Rohan Gunaratna.

<sup>9</sup> Joseph Chinyong Liow, "Shifting Sands of Terrorism in Southeast Asia", *RSIS Commentary*, no. 025 (2018): 1–5.

Pada perkembangannya, kelompok terorisme tidak hanya muncul di Indonesia, namun juga di negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia dan Thailand. Sebagai sebuah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, *ASEAN* dapat menjadi pionir utama bagi terciptanya kerja sama dalam bidang kontra terorisme di kawasan terkait. Menurut Jonathan T. Chow, kerja sama *ASEAN* di bidang terorisme dapat dibagi ke dalam dua periode waktu, yakni sebelum dan sesudah kejadian 9/11 pada tahun 2001<sup>10</sup>. Sebelum kejadian 9/11, terorisme dianggap sebagai aksi kejahatan transnasional oleh negara-negara di *ASEAN* bersama dengan penjualan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang dan pembajakan. Ketika negara-negara anggota *ASEAN* bersama-sama merumuskan *ASEAN Vision 2020* pada tahun 1997, tidak terdapat pembahasan khusus mengenai aksi terorisme di dalam pertemuan tersebut. Namun, setelah kejadian 9/11 tersebut *ASEAN* lebih memfokuskan pembahasan aksi kejahatan transnasional ke dalam aksi terorisme. Pada 5 November 2001, negara-negara anggota *ASEAN* menandatangani *ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*, dimana pembuatan deklarasi tersebut ditujukan untuk menekankan kerja sama multilateral diantara anggota *ASEAN* dalam bidang kontra terorisme dan akan melibatkan Amerika Serikat di dalamnya<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Jonathan T. Chow, "ASEAN Counterterrorism Cooperation since 9/11", *Asian Survey*, Vol. 45 (2005): 302 – 321.

<sup>11</sup> Ibid, Chow.

Dalam masa pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mengambil banyak peran penting dalam upaya kontra terorisme di lingkup Asia maupun internasional. Pada masa pemerintahannya, Joko Widodo menggunakan pendekatan yang berbeda dengan pemerintah terdahulu, yakni pendekatan keagamaan dan budaya kepada kelompok terorisme, hal tersebut dibuktikan dengan digandengnya *Nahdlatul Ulama* (NU) dan Muhammadiyah untuk ikut memerangi terorisme dan ekstremisme di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan *blueprint* perihal deradikalisasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pendirian pusat deradikalisasi bagi para narapidana teroris<sup>12</sup>. Selanjutnya, kebijakan luar negeri yang telah Indonesia lakukan dalam upaya kontra terorisme salah satunya adalah Indonesia menjadi sponsor bersama dalam resolusi Dewan Keamanan PBB tentang pengontrolan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) melalui pencegahan rekrutmen FTF, pertukaran informasi, penjagaan perbatasan negara, proses rehabilitasi dan reintegrasi pada tahun 2014<sup>13</sup>. Di tingkat regional, Indonesia melakukan kerja sama bersama dengan Filipina dan Malaysia dalam pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) untuk mencegah terjadinya pembajakan oleh teroris di Laut Sulu yang terdiri dari *Trilateral Maritime Patrol* (TMP),

---

<sup>12</sup> "Indonesia and Counter-Terrorism", Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia, Januari 20, 2016, (diakses pada 31 Januari 2019).

<sup>13</sup> Ibid.

*Trilateral Air Patrol (TAP)* dan *Maritime Command Centers (MCC)*<sup>14</sup>. Selain itu, Pada Januari 2018, sebanyak enam negara *ASEAN* meluncurkan “*Our-Eyes Initiative*” dimana dalam initiative ini, perwakilan pertahanan nasional keenam negara *ASEAN* yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei Darussalam melakukan pertemuan setiap enam bulan sekali untuk pertukaran informasi perihal para militan, strategi operasional dan taktis, *intelligent sharing*, serta pengembangan *database* perihal ekstremisme kekerasan dengan tujuan untuk memfasilitasi komunikasi intra-regional di seluruh negara *ASEAN*<sup>15</sup>.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Terorisme di Asia Tenggara selama satu dekade belakangan semakin menunjukkan eksistensinya, dibuktikan dengan adanya kota Marawi di Filipina oleh gabungan grup Abu Sayyaf berikut serangan sistematis di Surabaya oleh lebih dari tiga organisasi teroris yang bekerja sama. Dinamika tersebut terjadi dikarenakan kecanggihan organisasi teroris seperti *Al-Qaeda* dan *Jemaah Islamiyah* untuk bergerak dengan lancar melintasi perbatasan negara sangat kontras dengan inkonsistensi sistem hukum internal,

---

<sup>14</sup> Ryamizard Ryacudu, “Terrorism in Southeast Asia: The Need for Joint Counter-Terrorism Frameworks”, *Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 10 (2018): 1 – 3.

<sup>15</sup> Joseph Franco, “Transnational Security in the Sulu Sea: Something New or Something Old?”, *Note d’actualité n°9/16 de l’Observatoire de l’Asie du Sud-Est 2018/2019*, Juni, 2018, [https://centreasia.eu/wp-content/uploads/2019/01/9-Franco-Se%CC%81curite%CC%81Sulu\\_Juin2018.pdf](https://centreasia.eu/wp-content/uploads/2019/01/9-Franco-Se%CC%81curite%CC%81Sulu_Juin2018.pdf) (diakses pada 7 November 2019).

mekanisme penegakan hukum dan prioritas keamanan negara-negara anggota *ASEAN*<sup>16</sup>. Selain itu, besarnya daya tarik kelompok terorisme terhadap Indonesia pada khususnya juga disebabkan oleh jumlah populasi umat muslim yang sangat banyak di Indonesia<sup>17</sup>. Karenanya, permasalahan yang tengah dihadapi oleh Pemerintah Indonesia saat ini ialah untuk mencegah individu-individu dari kelompok radikal untuk pergi ke zona konflik dan bergabung dengan kelompok terorisme<sup>18</sup>. Indonesia di bawah pemerintahan Joko Widodo tidak mungkin mengubah komitmen terhadap perdamaian dan stabilitas regional, karena jika hal tersebut dilakukan maka keamanan nasional Indonesia juga akan terancam karenanya, terutama dalam kerja sama yang berkaitan dengan kontra terorisme.

Sebagai sebuah organisasi regional di Asia Tenggara, *ASEAN* memegang peranan penting dalam aksi kontra terorisme di Asia Tenggara yakni dengan membentuk kerja sama multilateral atau konsorsium guna menjadi sarana bagi negara-negara anggotanya untuk berkoordinasi dalam kontra terorisme itu sendiri<sup>19</sup>. Asia Tenggara merupakan ‘rumah’ bagi para militant islam pribumi selama beberapa dekade<sup>20</sup>. Namun pada pelaksanaan kerja sama diantara negara-negara anggota *ASEAN*, keputusan perihal kerja sama keamanan yang dihasilkan di bawah bendera *ASEAN* sulit sekali untuk

---

<sup>16</sup> Loc. Cit, Chow.

<sup>17</sup> Loc. Cit, Ryacudu.

<sup>18</sup> Iis Gindarsah dan Adhi Priamarizki, “Indonesia’s Maritime Doctrine and Security Concerns”, *RSIS Policy Report*: 1 – 15.

<sup>19</sup> Loc. Cit., Chow.

<sup>20</sup> Brian Vaughn, dkk., “Terrorism in Southeast Asia”, *CRS Report for Congress*: 1 – 65.



dicapai, karena organisasi regional ini memiliki norma non-intervensi atau lebih dikenal dengan “*ASEAN Way*”. Dengan adanya norma tersebut, negara-negara anggota *ASEAN* menjaga kedaulatan negaranya dan mewaspadai potensi intervensi pada kebijakan internal mereka<sup>21</sup>. Konsep non-intervensi *ASEAN* yang dijunjung tinggi oleh negara-negara anggotanya menyebabkan tidak kunjung terselesaikannya masalah terorisme di Asia Tenggara itu sendiri<sup>22</sup>.

### 1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembahasan di dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor internal dan eksternal dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya kontra terorisme di Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut dijadikan fokus dari penelitian penulis karena pendekatan yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam menanggapi aksi terorisme di Indonesia pada khususnya maupun Asia Tenggara pada umumnya berbeda dengan pendekatan para pendahulunya<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan definisi terorisme dari *Foreign Bureau Intelligence* (FBI). Selain itu, kebijakan luar negeri Indonesia di

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Chester Cabalaza, “Can ASEAN Work Together to Fight Regional Terrorism?”, *The Diplomat*, Agustus 9, 2017, <https://thediplomat.com/2017/08/can-ASEAN-work-together-to-fight-regional-terrorism/> (diakses pada 7 Februari 2019).

<sup>23</sup> Adhikutama dan Rendy Wirawan, “Contesting ISIS in Indonesia: Leadership and Ideological Barriers on Radicalism as Foundation to Counterterrorism”, *Social Sciences* (2018) : 55 – 62.

Asia Tenggara terkait kontra terorisme memegang peranan penting dalam aksi kontra terorisme di Indonesia sendiri, sehingga Indonesia harus memberikan kontribusi lebih dalam kerja sama terkait kontra terorisme di Asia Tenggara, khususnya berbagai kerja sama di bawah bendera ASEAN.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Setelah mencermati keberadaan terorisme di Asia Tenggara dan berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, maka kajian ini merumuskan pertanyaan penelitian: apa saja yang menjadi faktor internal dan eksternal dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo terkait isu kontra terorisme di Asia Tenggara?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan faktor eksternal dan internal yang menjadi pertimbangan dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya kontra terorisme di kawasan Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo.

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penulis mengharapkan jika penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Bagi yang berminat tentang kajian kebijakan luar negeri Indonesia terkait kontra terorisme, semoga hasil kajian ini dapat dipertimbangkan sebagai salah satu referensi.
2. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengkaji fenomena terorisme secara akademik dengan pengaplikasian teori dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri dalam bidang kontra terorisme.

### 1.4 Kajian Literatur

Dalam menganalisis kebijakan luar negeri Indonesia dalam kontra terorisme di Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo terdapat dua jurnal yang akan di review. Jurnal yang dijadikan referensi tersebut membahas tentang aksi terorisme di Asia Tenggara dengan fokus penelitian terhadap aksi kontra terorisme itu sendiri. Ketiga literatur tersebut hampir memiliki persamaan variabel dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Karenanya, digunakanlah jurnal karya Adhikatama dan Rendy Wirawan serta Ryamizard Ryacudu.

Penjelasan perihal pendekatan terhadap kelompok terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo dijelaskan oleh Adhikatama dan Rendy Wirawan dalam jurnal berjudul *Contesting ISIS in Indonesia: Leadership and*

*Ideological Barriers on Radicalism as Foundation to Counterterrorism.*

Jurnal ini juga menjelaskan tentang sikap dari Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia menanggapi rangkaian aksi teror dalam masa pemerintahannya. Adhikatama dan Rendy Wirawan juga menjelaskan secara runtut tentang berbagai aksi kontra terorisme yang ada di Indonesia sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Joko Widodo. Selain itu, terdapat pula bagian khusus di dalam jurnal ini perihal strategi kontra terorisme yang dilakukan oleh Joko Widodo, yaitu melalui *soft approaches* dan *firm policies*. Terakhir, Adhikatama dan Wirawan menganalisis Pancasila sebagai sebuah ideologi yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan terorisme di Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo<sup>24</sup>.

Kerja sama dalam bidang kontra terorisme dan berbagai ancaman terorisme di Asia Tenggara dijelaskan oleh Ryamizard Ryacudu dalam jurnalnya yang berjudul *Terrorism in Southeast Asia: The Need for Joint Counter-Terrorism Frameworks*. Jurnal tersebut memuat tentang solusi yang ditawarkan oleh Ryamizard Ryacudu terhadap aksi kontra terorisme di Asia Tenggara, terutama perihal rencana dan improvisasi kerja sama di bawah bendera *ASEAN*. Selanjutnya, Ryacudu juga menjelaskan berbagai aksi teror yang terjadi di negara-negara di Asia<sup>25</sup> Tenggara. Selain itu, Ryacudu juga menjelaskan perihal kerja sama yang telah dicapai oleh *ASEAN* dalam aksi

---

<sup>24</sup> Loc. Cit., Adhikatama dan Wirawan.

<sup>25</sup> Loc. Cit., Ryacudu.

kontra terorisme, mengingat bahwa Asia Tenggara merupakan “sarang” bagi anggota kelompok terorisme dan radikalisme.

Kedua jurnal yang dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan memiliki persamaan variabel dan fokus penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, jurnal karya Adhikatama dan Rendy Wirawan secara khusus hanya berfokus pada jaringan terorisme ISIS dan ideologi sebagai solusi strategi kontra terorisme di Indonesia. Sedangkan jurnal kedua karya Ryamizard Ryacudu berfokus pada aksi kontra terorisme di Asia Tenggara, terutama berbagai kerja sama perihal kontra terorisme di bawah bendera *ASEAN*. Karenanya, jurnal-jurnal tersebut belum dapat menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam kontra terorisme di Asia Tenggara. Maka dari itu, diadakanlah penelitian ini dengan harapan bahwa penelitian tentang kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang kontra terorisme di Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo akan berhasil menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

Dalam mengatasi aksi terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia, Pemerintah Indonesia senantiasa memberikan peran aktif dalam berbagai kerja sama di bidang kontra terorisme sejak tahun 1999 hingga saat

ini, baik dalam lingkup internasional maupun ASEAN<sup>26</sup>. Menurut *Federal Bureau of Investigation* (FBI), terorisme adalah aksi teror oleh individu atau kelompok yang diinspirasi oleh gerakan berbasis ekstrimisme politik, agama, sosial, rasial atau lingkungan<sup>27</sup>. Selanjutnya, Menurut *ASEAN Convention on Counter Terrorism*, terorisme merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional dan merupakan tantangan langsung terhadap pencapaian perdamaian, kemajuan dan kemakmuran ASEAN serta realisasi Visi ASEAN 2020<sup>28</sup>. Terakhir, menurut Undang-Undang no. 5/2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, dapat menimbulkan korban atau kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan terhadap keamanan<sup>29</sup>.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pendekatan pemerintah Indonesia untuk mencegah terjadinya radikalisme yang mengarah pada aksi terorisme dilakukan dengan menggandeng organisasi keagamaan dan menekankan pendekatannya di bidang keagamaan dan budaya<sup>30</sup>. Berkaitan dengan kebijakan kontra terorisme di dalam negeri, Pemerintah Indonesia

---

<sup>26</sup> Loc. Cit., “Indonesia and Counter-Terrorism”.

<sup>27</sup> “Terrorism”, *FBI*, <https://www.fbi.gov/investigate/terrorism> (diakses pada 28 Februari 2019).

<sup>28</sup> “ASEAN Convention on Counter Terrorism”, (2017): 2.

<sup>29</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 2018”, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

<sup>30</sup> Loc. Cit., Adhikatama dan Wirawan.

telah melahirkan UU No. 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang dikeluarkan setelah terjadinya tragedi bom Surabaya.pada 13 hingga 14 Mei 2018. UU anti terorisme yang telah “selangkah” di depan para terorisme, menunjukkan keseriusan dan komitmen pemerintah Indonesia dalam aksi kontra terorisme baik diluar maupun di dalam negeri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan neorealisme, dimana pendekatan tersebut menekankan pada hasil dari interaksi dan tindakan negara serta latar belakang dari tiap-tiap negara dalam menghasilkan berbagai kebijakan luar negerinya<sup>31</sup>. Menurut Kenneth Waltz, struktur latar belakang dari negara-negara tersebut dapat dipengaruhi oleh tekanan dan perubahan sistem yang didapatkan oleh suatu negara<sup>32</sup>. Selain itu, neorealisme juga percaya bahwa terdapat hubungan antara *power* dan kebijakan yang dihasilkan sebuah negara, dimana hal tersebut membutuhkan penelitian mendalam dari konteks perumusan dan implementasi kebijakan itu sendiri<sup>33</sup>. Menurut Milja Kurki, neorealisme berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara itu sendiri<sup>34</sup>. Pendekatan neorealisme digunakan untuk menganalisis motivasi dari kebijakan luar negeri yang dihasilkan oleh Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo dalam upaya kontra terorisme di Asia Tenggara.

---

<sup>31</sup> Milja Kurki, Steve Smith dan Tim Dunne, *International Relations Theories* (Italy: Oxford University Press, 2010).

<sup>32</sup> Gideon Rose, “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, *World Politics*, Vol. 51 (1998): 144 – 172.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Loc. Cit., Kurki, Smith dan Dunne.

Dalam menganalisis pertimbangan internal dan eksternal dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang kontra terorisme, digunakanlah *Role Theory and Foreign Policy* oleh K. J. Holsti. Menurut Holsti, terdapat empat konsep yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri, yakni *role performances*, *national role conception*, *role prescriptions* dan *position*<sup>35</sup>. *Role performances* merupakan konsepsi pembuatan kebijakan tentang peran negara mereka di suatu kawasan atau dalam sistem internasional yang diwujudkan melalui kebijakan luar negeri, meliputi sikap, keputusan, tanggapan, fungsi dan komitmen terhadap negara lain. Selanjutnya, *national role conception* adalah definisi dari pembuat kebijakan tentang berbagai jenis keputusan umum, komitmen, aturan dan tindakan yang sesuai dengan negaranya. Menurut Holsti, terdapat dua jenis *national role conception*, yakni internal dan eksternal. *National role conception* internal bersumber dari lokasi atau fitur topografi utama negara; sumber daya alam; ekonomi dan teknis; kemampuan negara, kebijakan tradisional; tuntutan dan kebutuhan sosial-ekonomi melalui partai politik, gerakan massa atau kelompok kepentingan; nilai-nilai; doktrin atau ideologi nasional; opini publik; serta kebutuhan kepribadian atau politik pembuat kebijakan utama. *National role conception* eksternal bersumber dari struktur sistem internasional; nilai-nilai dalam sistem; prinsip umum hukum internasional; aturan, tradisi dan harapan negara sesuai dengan yang

---

<sup>35</sup> K. J. Holsti, "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy", *International Studies Quarterly*, Vol. 14 (1970): 233-209.



dinyatakan dalam piagam internasional atau regional; opini masyarakat internasional; perjanjian multilateral dan bilateral; serta komitmen dan pemahaman secara informal atau implisit.

Guna menganalisis “sifat” dari kebijakan luar negeri Indonesia, digunakanlah teori *defensive realism*. Teori tersebut menekankan bahwa negara-negara rasional yang mengejar keamanan seringkali bersikap santai dan hanya menanggapi ancaman-ancaman eksternal, dimana menurut Gideon Rose ancaman eksternal itu sendiri merupakan salah satu hal yang jarang ada<sup>36</sup>. Selain itu, dikatakan pula bahwa negara-negara yang ada pada umumnya memberikan respon terhadap ancaman tersebut dengan melakukan *balancing*, menghalangi ancaman dan menghindarkan terjadinya kemungkinan konflik<sup>37</sup>. *Defensive realism* melihat kebijakan luar negeri sebagai sebuah catatan perihal reaksi negara-negara terhadap *systemic incentives* dan menanggapi konflik ketika dilema keamanan ditingkatkan.

Selanjutnya, untuk memahami langkah Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kelompok terorisme di Indonesia, digunakanlah model kontra terorisme oleh Eric Posner, dimana terdapat *war model*, *law enforcement model* dan model pengaturan<sup>38</sup>. Dalam *law enforcement model*, agen intelijen negara bersama dengan kepolisian memegang peranan penting dalam melacak jejak-jejak kelompok terorisme tersebut, sedangkan

---

<sup>36</sup> Loc. Cit., Rose.

<sup>37</sup> Loc. Cit., Kurki, Smith dan Dunne.

<sup>38</sup> Eric Posner, “Fear and Regulatory Model of Counterterrorism”, *25 Harvard Journal of Law and Public Policy* 681 (2002).

pengacara, hakim dan unsur-unsur penegak hukum lainnya akan mengambil peran dalam mengadili dan memenjarakan anggota teroris. Dalam *war model*, wewenang pemberantasan kelompok terorisme diserahkan kepada militer, sedangkan kepolisian hanya bertugas untuk mencari, menginterogasi dan menahan anggota teroris yang ada. Dalam *war model*, pemerintah tidak menghukum teroris tersebut karena dianggap dapat mengganggu jaringan dan melecehkan pendukung mereka. Terakhir, model pengaturan memandang teroris sebagai ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan, dimana hal tersebut memerlukan respon birokratik dari organisasi dan institusi negara.

## 1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1.6.1 Metode Penelitian

Guna menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada pendekatan interpretatif dan kebutuhan untuk mempelajari sebanyak mungkin kasus-kasus terdahulu<sup>39</sup>. Menurut Clifford Geertz, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dapat mengembangkan teori dari studi

---

<sup>39</sup> Lisa Harrison dan Theresa Callan, "Qualitative Methods", *Key Research Concepts in Politics & International Relations* (SAGE Publications, Inc.: London, 2013)

empiris oleh peneliti<sup>40</sup>. Pemilihan kualitatif sebagai metode penelitian didasarkan pada jenis-jenis data yang akan dijadikan referensi oleh penulis dalam penelitian dengan topik kebijakan luar negeri Indonesia dalam kontraterorisme di Asia Tenggara pada masa pemerintahan Joko Widodo, dimana data-data tersebut hadir dalam bentuk dokumen.

Adapun sistematika dari metode kualitatif adalah:

1. Merumuskan pertanyaan penelitian yang berisi fokus dari penelitian itu sendiri.
2. Melakukan pengumpulan sumber dan data yang dapat dilakukan dengan studi literatur atau wawancara.
3. Interpretasi data dengan menggunakan kerangka konseptual dan teoretis untuk menemukan berbagai temuan penelitian.
4. Melakukan spesifikasi pertanyaan penelitian.
5. Melengkapi kembali data setelah dilakukan spesifikasi pertanyaan penelitian.
6. Menuliskan berbagai temuan penelitian dan kesimpulan<sup>41</sup>.

Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk menjadi sumber referensi dalam penelitian ini adalah dokumen resmi dari *ASEAN* atau pemerintah negara-negara Asia Tenggara, perjanjian kerja sama, literatur

---

<sup>40</sup> Uwe Flick, *An Introduction to Qualitative Research* (SAGE Publications, Inc.: Hamburg, 2009).

<sup>41</sup> Alan Bryman, *Social Research Methods*, 4<sup>th</sup> Edition (Oxford University Press: United States, 2012).

dan jurnal akademik. Kemudian, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori *defensive realism* milik Kenneth Waltz dan kontraterorisme model milik Eric Posner guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Guna menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penulis akan menggunakan metode analisis dokumen. Menurut Glenn A. Bowen, analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen cetak maupun elektronik guna memperoleh makna, pemahaman dan mengembangkan pengetahuan empiris<sup>42</sup>. Menurut Lisa Harrison dan Theresa Callan, dokumen dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu dokumen publik dan pribadi. Dokumen publik merupakan dokumen yang dibuat dan diarsipkan untuk tujuan akuntabilitas, sebagai contohnya adalah laporan dari institusi resmi pemerintah atau organisasi. Sedangkan dokumen pribadi adalah dokumen dalam tahap eksplorasi, dimana sumber-sumber tersebut berupa manuskrip, memo dan foto<sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9 (2009) : 27 – 40.

<sup>43</sup> Lisa Harrison dan Theresa Callan, "Documentary Analysis", *Key Research Concepts in Politics & International Relations*.

## 1.7 Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan dibagi dalam empat bab utama yang terdiri dari:

- Bab I** : Bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, kajian literatur, kerangka pemikiran, kegunaan penelitian dan metode penelitian.
- Bab II** : Membahas tentang terorisme di Indonesia dan perkembangan kerja sama kontra terorisme di Asia Tenggara.
- Bab III** : Menjelaskan perihal faktor internal dan eksternal sebagai pertimbangan kebijakan luar negeri Indonesia dalam bidang kontra-terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo di Asia Tenggara
- Bab IV** : Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

## 1.8 Kerangka Kerja

Agenda	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
<b>Bab 2</b>																				
Kerjasama kontra terorisme di ASEAN sebelum 9/11	■	■																		
Kerjasama kontra terorisme di ASEAN sesudah 9/11			■	■																
Revisi Bab 2					■	■														
<b>Bab 3</b>																				
<i>Specific-Actor Theory</i>							■	■												
<i>Model on Counterterrorism</i>									■	■										
<i>Two-Level Games</i>										■	■									
Revisi Bab 3											■	■								
<b>Bab 4</b>																				
Kesimpulan																■	■			
Revisi Bab 4																	■	■		
Revisi Keseluruhan																		■	■	■